

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004
- Abdul Muis BJ, Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, SCIENTIA REGENDI Volume I, No 1 Agustus, 2019, (62-71).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Arie Satria Hadi Pratama, Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti, *Corruptio*, Volume 1 Issue 2, July-December 2020, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2095>
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Doyle, Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, Jakarta, Gramedia, 1986.
- Effendy, Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*. Ujung Pandang, Hasanuddin University Press, 1991.
- Efi Lalila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Jakarta: Solusi Publishing, (2010).
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 2010

- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Gary S. Green, *Occupational Crime*, Chicago: Nelson-Hall, 1990.
- Hamamah, F., & Bachtiar, H. (2019). Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Cendekia Jaya*, 1(2), 73-98. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36>
- Hamzah, Andi. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1998.  
<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>.
- Idhamsyah, Makalah Pelaksanaan Hukum Dalam Masyarakat, <https://idhamsyah12.wordpress.com>
- Ismansyah, penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, *journal demokrasi* Vol. VI No. 2 Th. 2007.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta. 2003
- Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI: Lampiran IV Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung, PT. Alumni, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, (2013).
- Mulatua, Saut, and Ferdricka Nggeboe. "Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 9, No.1 (2019): 46-79.

- Munzil Fontian, Dkk “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Dalam Rangka Melindungi Ekonomi Negara Dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1 (2015)
- Nazamuddin, Muhammad Nur, dan Yulia, Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi, Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10 No. 2 (2022)
- PAF Lamintang dan Theo Larnintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 83, dan selanjutnya dapat dilihat dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- Poernomo, Bambang, *Seminar Hukum, Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tuga Penegakan Hukum*. Jogjakarta, Seksi Hukum Pidana Kriminologi FH UGM, 1978.
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Risky Wahyuningsih dan Amir Faisal, Hambatan Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 1, April 2022 (219-233)
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Suparni, Nanik, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta Sinar, Grafika, 1992.
- Syed Husen Alatas dalam Martiman ProdjoHamidjojo. *Penerapan pembuktian terbaik dalam delik korupsi (UU No. 20 tahun 2001)*. Bandung. Mandar Maju. 2009.
- Tajul Arifin. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. CV Pustaka Setia
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Yakop Lili, Baharudin Badaru & Hamza Baharuddin, Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili, *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 1 Nomor 2. September 2020, 281-295.